

AKSES  TERBUKA **ARTIKEL**

Diterima
16 Juni 2025

Disetujui
10 Maret 2026

Diterbitkan
Maret 2026

DOI

Peran BPPD Provinsi Kepri Dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Di Kepulauan Riau Tahun 2024

The Role of Bppd of Kepri Province in Helping Improve the Welfare of Border Communities in the Riau Islands in 2024

Aditya Wahyu Saputra¹, Rizky Octa Putri Charin², Indra Bastian Tahir³

Universitas Maritim Raja Ali Haji¹;
BPPD Provinsi Kepulauan Riau²

✉ haditiaadit020@gmail.com¹

☎ 082284579580¹

Abstrak: BPPD merupakan instansi yang berperan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. BPPD Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibawah naungan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari BPPD Kepri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik studi literatur yaitu mengumpulkan beberapa sumber seperti buku, majalah, jurnal, dan berita. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah BPPD Provinsi Kepri berperan sebagai koordinasi dan pengawasan pembangunan dan pemanfaatan di wilayah perbatasan. BPPD Kepri dalam perannya melakukan koordinatif dan pengawasan, pengembangan infrastruktur perekonomian dan kerjasama luar negeri SosekMalindo.. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas BPPD Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. BPPD Kepri juga berperan dalam Kerjasama Sosek Malindo pada bidang Bidang Kesehatan, Bidang Industri dan Perdagangan, Bidang Pariwisata, Bidang Perhubungan, Bidang Keselamatan dan Pengurusan, dan Bidang Imigrasi dan Bea Cukai.

Kata Kunci: Peran; BPPD; SosekMalindo; Kesejahteraan.

Abstrack : BPPD is an agency that plays a role in the management of border areas. The BPPD of Riau Islands Province is a Regional Apparatus Organization under the auspices of the National Border Management Agency (BNPP). The purpose of this study is to understand the role of BPPD Kepri in helping to improve the welfare of border communities in Riau Islands Province. The method used in this writing is the literature study technique, which involves collecting several sources such as books, magazines, journals, and news. The results found in this study indicate that BPPD of Kepri Province acts as a coordinator and supervisor of development and utilization in border areas. In its role, BPPD Kepri carries out coordination and supervision, economic infrastructure development, and foreign cooperation in SosekMalindo. There are several regencies/cities that are the priorities of the Regional Development Planning Board (BPPD) of the Riau Islands Province, namely Bintan Regency, Batam City, Karimun Regency, Anambas Islands Regency, and Natuna Regency. The BPPD of the Riau Islands also plays a role in Malindo Socio-Economic Cooperation in the fields of Health, Industry and Trade, Tourism, Transportation, Safety and Administration, and Immigration and Customs.

Keywords: *Role; BPPD; SosekMalindo; Welfare.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki batas wilayah yang bebatasan dengan negara lain, contohnya seperti Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Serawak dan Sabah yang merupakan bagian dari negara Malaysia, Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia dibagian Timur dan Singapura di bagian Barat, Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam (Rahayu & Junior, 2021). Oleh karena itu, diperlukan peran dari pemerintah untuk mengelola daerah perbatasan tersebut.

Peran menurut Damsar dalam (Nartin & Musin, 2022) merupakan suatu kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang bertujuan untuk mewujudkan cita, rasa dan krasa yang dimiliki berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Selain itu menurut Soekanto peran merupakan suatu aspek dinami dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD-RI) Tahun 1945, pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan perintisp otonomi dan tugas pembantuan

Berdasarkan pasal diatas dijelaskan bahwa setiap pemerintah daerah berhak untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan berdasarkan asas prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Peran Pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan kegiatan pengelolaan yang memberikan informasi, pengetahuan, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan daerah (Sonia & Susilawati, 2022).

Peran dari pemerintah tersebut tentunya akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu yang paling penting untuk perhatian oleh pemerintah.

Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki tugas pokok yaitu Fungsi Pelayanan, Fungsi Pembangunan, Fungsi Pengaturan, dan Fungsi Pemberdayaan. Setiap fungsi tersebut tentunya memiliki tugas masing-masing yang akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Windasai, 2021). Kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan suatu kondisi *agregat* dari kepuasan setiap orang. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan ekonomi. Kesejahteraan meningkat maka kondisi perekonomian juga baik (Nartin & Musin, 2022). Menurut Badrudin, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukan tentang kehidupan masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan di masyarakat. Sementara itu, menurut Todaro dan Setphen kesejahteraan masyarakat yaitu tercukupinya kebutuhan dasar yang terlihat dari layaknya tempat tinggal, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan (Nartin & Musin, 2022).

Kesejahteraan masyarakat dapat meliputi pembangunan ekonomi yang dapat dilihat melalui tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran tersebut dapat menunjukan kondisi perekonomian suatu negara dalam kondisi berkembang, lambat, bahkan mengalami kemunduran (Ardian *et al.*, 2024).

Menurut Todaro & Smith dalam (Mahmut, 2022) terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan jumlah penduduk pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) menunjukan tingkat perekonomian di Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5.03% hal ini tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia (BPS Republik Indonesia, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Delia, 2025) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Badan

Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia” Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dan penguatan dasar hukum agar perbatasan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai garis kedaulatan, tetapi juga sebagai beranda depan NKRI yang aman, sejahtera, dan berdaya saing. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tuakra, 2025) yang berjudul “Tata Kelola Perbatasan yang Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan dan Keamanan di Merauke” penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tata kelola perbatasan yang berkelanjutan dengan menekankan pada sinergi lintas sektor, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola di wilayah perbatasan Merauke.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian ini akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada aspek perekonomian di Provinsi kepulauan Riau di kawasan perbatasan. Berdasarkan data BPS Kepri tingkat perekonomian di Kepri pada tahun 2024 di Kepri sebesar 5,02% yang dimana tumbuh lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,16% (BPS Provinsi Kepri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat perekonomian di Kepri pada tahun 2024. Oleh karena itu perlunya pemerintah Kepri berupaya dalam meningkatkan perekonomian di Kepri sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat Kepri. Adapun masyarakat perbatasan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah karena Kepri merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Penelitian ini penting dilakukan karena BPPD Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan turunan dari BNPP untuk membantu mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini juga perlu dikaji karena belum adanya kajian yang berfokus langsung pada peran BPPD Kepri dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peran BPPD Provinsi Kepri dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Di Kepulauan Riau.” Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk melihat Bagaimana peran BPPD Kepri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik studi literatur. Penerapan teknik tersebut diterapkan pada penulisan ini yaitu dengan mencari sumber atau dokumen yang sesuai dengan fenomena yang dibahas. Pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologi (*sociology approach*) serta pendekatan kepustakaan (*library approach*) yang bertujuan untuk menganalisis peran-peran yang dilakukan BPPD untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPPD Kepri adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam pengelolaan wilayah perbatasan wilayah Kepulauan Riau. BPPD Provinsi Kepri berperan sesuai dengan Permendagri No 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 10 yaitu BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap batas wilayah negara kawasan perbatasan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 ayat

4 yang berbunyi Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Undang-Undang No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang diturunkan dalam Peraturan Presiden No 43 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Konstitusi ini merupakan landasan dari BPPD Provinsi Kepri melakukan perannya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau.

BBPD Kepri merupakan lembaga daerah yang berfungsi dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kepulauan Riau seperti Natuna, Anambas, Batam, Bintan, dan Karimun. Oleh karena itu, peran dari BPPD memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan kawasan perbatasan karena sebagai OPD yang memperhatikan terhadap pengelolaan wilayah perbatasan.

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu cara negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan ekonomi antara wilayah perkotaan dengan wilayah pingiran, kesenjangan ekonomi dan infrastruktur harus diatasi melalui pembangunan wilayah perbatasan dengan harapan angka harapan hidup dan taraf hidup masyarakat meningkat (Setyawan & Sumarto, 2025).

Sebagai input kebijakan, BPPD berpijak pada landasan yuridis seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 140 Tahun 2017, yang kemudian diaktualisasikan melalui aktivitas koordinasi lintas sektor dan diplomasi internasional dalam forum Sosek Malindo. Proses ini menghasilkan output nyata berupa akumulasi modal fisik (pengadaan kapal tangkap dan alat budidaya), kemajuan teknologi (platform pariwisata Jiwa dan navigasi mercusuar), serta

penguatan angkatan kerja melalui pembukaan akses pasar luar negeri. Secara kausalitas, intervensi BPPD pada tiga komponen pertumbuhan ekonomi menurut teori Todaro dan Smith ini menjadi motor penggerak yang menurunkan biaya produksi nelayan dan memperluas lapangan kerja, yang pada akhirnya memberikan dampak (impact) terukur pada Sasaran dan Target Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelola kecamatan sebanyak 222 lokpri dan rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSNI yang diharapkan pada akhir Rencana Induk dan RPJMN mencapai 0,52 (Latuconsina et al., 2023)

Untuk mendukung hal tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan BPPD memiliki beberapa peran adalah sebagai berikut:

A. Peran Koordinatif dan Pengawasan BPPD Provinsi Kepri

Peran Koordinatif BPPD Provinsi Kepri memiliki kontribusi menurut teori peran pemerintah yaitu pada aspek pembangunan BPPD Provinsi Kepri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Kepri yaitu melakukan Koordinasi dan Pengawasan. Koordinasi dan Pengawasan tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan, kemudian beberapa usulan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait pembangunan dan pemanfaatan yang diterima oleh provinsi kemudian direkap dan disulkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan setiap tahun yang termuat dalam Rencana Aksi kawasan Perbatasan Kepri.

Peran Koordinatif BPPD Kepri tersebut tentunya akan memberikan kontribusi yang besar dalam tata kelola perbatasan hal ini dikarenakan BPPD Kepri dijadikan sebagai alternatif penghubung berupa komunikasi dan kualitas antara kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional.

Koordinasi juga dapat menjamin terhadap sinkronisasi program antar kabupaten/kota, dengan begitu BPPD berperan sebagai katalisator yang mengubah aspirasi lokal menjadi Rencana Aksi yang terstruktur yang kemudian didukung oleh pusat. Selanjutnya pengawasan dengan melalui pengawasan BPPD tentunya dapat memastikan bahwa usulan-usulan yang diajukan tersebut tepat sasaran dan relevan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Peran BPPD dalam Pengembangan Infrastruktur Perekonomian

Berdasarkan dokumen Peningkatan Pengelolaan Perbatasan Daerah Melalui Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (BPPD Provinsi Kepri, 2024) terdapat beberapa peran yang telah dilakukan oleh BPPD Provinsi Kepri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan pada aspek pembangunan dan pemanfaatan. Pada aspek pembangunan BPPD Provinsi Kepri telah melakukan beberapa upaya yaitu berupa penyediaan seperti:

- 1) Sarana penangkapan ikan seperti alat tangkap ikan dan alat keselamatan pelayaran dan kapal tangkap ikan berukuran kurang dari 5GT di Batu Berapit dan Letung di Kecamatan Jemaja.
- 2) Pengadaan peralatan, Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dan Saranan Penangkapan Ikan di Kecamatan Jemaja Timur
- 3) Pengadaan Sarana Tangkap Ikan dan Budidaya Ikan Laut Seperti Perahu pada Desa Tebang sebanyak 6 unit, Desa Ladan sebanyak 11 Unit, Desa Putik sebanyak 9 unit dan Desa Candi sebanyak 2 unit di Kecamatan Palmatak
- 4) Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Tangkap Ikan pada Desa Tarempa Barat, Tarempa Timur, Sri Tanjung di Kecamatan Siantan
- 5) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan perahu kecil dari 5 GT di Desa Tarempa Barat sebanyak 3 unit, Desa Tarempa Timur

sebanyak 22 unit, Desa Pesisir Timur 10 unit di Kecamatan Siantan

- 6) Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan yang berukuran lebih kecil dari 5 GT di Desa Kiabu sebanyak 1 unit, dan Desa Mengkait 3 unit di Kecamatan Siantan Selatan
- 7) Pengadaan Mesin Kapal Perikanan dan Sarana Tangkap Ikan Kurang dari 5 GT Pada Desa Piasan Sebanyak 4 unit dan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut pada Desa Pesisir Timur sebanyak 1 unit di Kecamatan Siantan Utara
- 8) Pengadaan sarana moda transportasi darat di Kecamatan Bunguran Selatan.

Selain itu, BPPD Kepri juga memiliki peran di Kabupaten/Kota Prioritas pada aspek pemanfaatan berdasarkan data Rekapitulasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Tahun 2024 yaitu adalah: Pemanfaatan pada sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan dan Peternakan, ke empat sektor tersebut dimanfaatkan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat Kabupaten/Kota Prioritas yaitu Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna, Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat perbatasan Kepri khususnya di Kabupaten/Kota Prioritas (BPPD Provinsi Kepri, 2024).

C. Peran BPPD dalam Kerjasama Luar Negeri Sosek Malindo

Kerjasama Internasional adalah hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan, akan tetapi disahkan secara hukum seperti melalui organisasi internasional atau rezim internasional (Krestian, 2025). Pada kerja sama ini yang dilakukan oleh BPPD Kepri adalah bekerja sama dengan Malaysia yaitu Sosek Malindo.

Sosek Malindo di Kepri terdapat dua tingkat yaitu Kepri, Serawak, dan Kalimantan Barat, dan yang kedua yaitu Kerjasama Sosek Malindo Riau, Kepri, Malaka dan Johor. Kerjasama Kepulauan

Riau dan Serawak hanya berperan sebagai peninjau, akan tetapi BPPD Kepri telah berupaya untuk melakukan kerjasama Perikanan dengan Serawak pada forum Sosek Malindo, hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap ikan yang sangat tinggi di Serawak oleh karena itu, BPPD Provinsi Kepri melihat potensi ini dengan mengusulkan Kerjasama antara Natuna dengan Serawak. Kerjasama perikanan ini tentunya akan membantu kesejahteraan masyarakat nelayan di Natuna dan mengurangi risiko penangkapan nelayan Kepri di perairan Malaysia (Ogen, 2024).

Akan tetapi, Kepri lebih sering melakukan kerjasama dengan Johor/Malaka, telah melakukan kegiatan seperti bidang sosial yaitu pembentukan tim pemulangan Janazah, kerjasama pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Selain itu, telah banyak kegiatan yang diusulkan pada Sosek Malindo Kepri dengan Malaka/Johor, beberapa kegiatan yang diusulkan berdasarkan Kertas Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Kepri yaitu:

- 1) Bidang Kesehatan, Kepri mengusulkan kerjasama bagi penempatan tenaga kerja formal dibidang Keperawatan antara Kepri/Riau dan Johor/Malaka.
- 2) Bidang Industri dan Perdagangan, pihak Kepri mengusulkan untuk diadakannya kerjasama secara resmi terkait dengan bahan baku atau hasil produk perikanan antara Kepri dan Johor yang melibatkan pihak swasta yang terkait. Selain itu, Kepri juga mengusulkan untuk membuat video promosi bersama dengan menampilkan logo Sosek Malindo dalam Produknya.
- 3) Bidang Pariwisata, pihak Kepri mengusulkan Program *Special Border Treatmen* (pelayanan khusus untuk warga perbatasan antar negara) antara Kepri dan Johor terhadap wisatawan yang berkunjung ke destinasi atau tujuan wisata unggulan di masing-masing negara.
- 4) Bidang Perhubungan, Kepri mengusulkan agar upaya pembukaan jalur penumpang

Tioman-Anambas hal ini dikarenakan Kepri memperoleh informasi bahwa *feasibility study* terkait kelayakan pembukaan jalur penumpang Tioman-Anambas dan Kepri mendukung penuh untuk dibukanya jalur tersebut.

- 5) Bidang Keselamatan dan Pengurusan, Kepri mengusulkan informasi terkait kasus penyeludupan hasil tambang agar dapat dilakukan pencegahan dini bersama antara Malaysia dan Indonesia; Kepri mengusulkan untuk melakukan kerjasama antara Bakamla Zona Maritim Barat dan Instansi terkait bersama PDRM dan APMM yang bertujuan untuk bertukar informasi dalam melakukan upaya pencegahan terkait lokasi pencemaran limbah laut, penanganan tumpahan limbah kapal, dan pemberhentian pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal pembuang limbah di laut; Kepri mengusulkan agar dilakukan Sosialisasi *MOU Common Guidline* (kapal nelayan tradisional, tanpa GPS, dan menggunakan alat pancing tradisional) kepada para penegak hukum, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penangkapan nelayan yang memenuhi kriteria untuk di halau kembali ke perairan negara asal berdasarkan *MOU Common Guidline*; Kepri mengusulkan agar Pemerintah Malaysia harus memastikan legalitas barang impor yang masuk ke wilayahnya dan keabsahan dokumen ekspor/impor barang.
- 6) Bidang Imigrasi dan Bea Cukai, Kepri mengusulkan pengesahan bagi paspor Warga Negara Indonesia (WNI) dan beberapa kategori Warga Negara Asing (WNA) yang berangkat dari pelabuhan Batam Center sebagai pemberlakuan *Auto Gate/E-Gate* di Batam Center sejak 4 Januari 2024; Kepri mengusulkan kerjasama untuk memperluas penyebaran informasi nomor pengaduan (*hotline*) pada setiap pintu masuk/ tempat pemeriksaan imigrasi Johor/Malaka dan Riau/Kepri.

Usulan-usulan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh BPPD Provinsi Kepri dengan persetujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kepri melalui Rapat Kertas Kerja. Kemudian usulan-usulan tersebut akan dibahas pada rapat pertumuan Sosek Malindo ke-21 di Riau. Sebagaimana peran BPPD sebagai koordinator untuk mewujudkan dalam fasilitasi dialog dan consensus antara provinsi dan kab/kota. Hal ini menunjukkan bahwasanya kerjasama luar negeri yang dibahas dalam forum Sosek Malindo, memiliki dukungan dari pemerintah Kepri. Keterlibatan pada rapat kerja ini membuktikan bahwa BPPD berkomitmen dalam upaya mewujudkan tata kelola perbatasan yang inklusif, dimana dampak dari kerjasama bilateral tersebut bukan hanya terpusat di ibu kota provinsi akan tetapi juga dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota perbatasan yang menjadi focus utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Teori pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith dalam (Mahmut, 2022) terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan jumlah penduduk pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Tiga Komponen tersebut apabila dikaitkan dengan peran yang telah dilakukan oleh BPPD Provinsi Kepri yaitu:

1) Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan peningkatan stok modal baik seperti infrastruktur dan alat lainnya, pada indikator ini BPPD Provinsi Kepri telah membantu dalam meningkatkan kebutuhan berupa sarana tangkap ikan, budidaya hasil laut, mesin, dan pengadaan moda transportasi darat. Hal ini tentunya akan membantu masyarakat perbatasan dalam mengelola lautnya dan yang terpenting akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan dengan bantuan yang telah diberikan tersebut. Selain itu, BPPD Provinsi Kepri juga telah melakukan

kerjasama luar negeri berupa Sosek Malindo, dengan kerjasama ini tentunya akan memberikan peluang bagi masyarakat perbatasan Kepri dalam mengelola lautnya, seperti menjual hasil laut seperti Ikan ke Negara Malaysia, dan pada aspek pariwisata juga akan menghidupkan UMKM lokal dari warga Negara Malaysia yang berkunjung ke Kepri seperti Kerjasama Kepri dan Johor yaitu Jiran Istimewa (JIWA) yang merupakan platform promosi wisata, dengan begitu kerjasama Sosek Malindo akan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kepri.

2) Pertumbuhan angkatan kerja

BPPD Kepri telah melakukan fasilitasi kerjasama yang bertujuan untuk menyediakan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerjasama yang dilakukan BPPD Provinsi Kepri dengan Negara Malaysia pada kerjasama pariwisata tentunya akan membantu membuka lapangan pekerjaan, seperti Pemandu Wisata, UMKM, hal ini tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran di kepri. Lapangan kerja yang tercipta tersebut tidak hanya sebatas pada sektor formal saja, akan tetapi juga membantu dalam pertumbuhan sektor usaha mikra seperti UMKM yang bergerak pada beberapa bidang seperti kuliner, kerajinan, fasilitasi akomodasi skala kecil, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan BPPD berperan sebagai penggerak ekonomi dengan memanfaatkan kondisi geografis yang strategis dari Kepulauan Riau yang dapat mentransformasikan potensi sektor pariwisata perbatasan untuk menjadi peluang ekonomi inklusif bagi masyarakat.

3) Kemajuan Teknologi

BPPD Provinsi Kepri melalui kerjasama Sosek Malindo telah membantu dalam kemajuan teknologi di Kepri seperti salah satu platform promosi wisata yang diluncurkan oleh Kepri dan Johor Bahru yaitu Jiran Istimewa (JIWA). Platform ini bertujuan untuk memperkokoh

hubungan pariwisata dan memudahkan akses wisata pada Kepri dan Johor Bahru. Platform tersebut diluncurkan pada forum Asita Kepri BCA Travel Fair 2025 di Kota Batam. Dengan begitu upaya kerjasama yang dilakukan BPPD Provinsi Kepri dengan Malaysia pada Sosek Malindo tersebut akan membantu kemajuan teknologi di Kepri yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat Pemecah Ombak yang ada di Pulau Sentut, dan Menara Marcusuar yang terletak di Karangsinga.

Kehadiran beberapa teknologi seperti pemecah ombak di Pulau Sentut tentunya memiliki fungsi yang berpengaruh terhadap kawasan pesisir karena dapat melindungi permukiman nelayan, sarana penangkapan ikan dari abrasi gelombang pasang, yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap keberlanjutan ekonomi maritime masyarakat pulau setempat. Selain itu, kehadiran teknologi seperti Marcusuar yang terletak di Karangsinga memiliki tujuan sebagai penunjang keselamatan pelayaran bahkan navigasi diperaian. Teknologi tersebut tentunya secara langsung mendukung terhadap keberhasilan platform JIWA dan sektor pariwisata karena terdapat jaminan terhadap konektivitas dan keamanan transportasi.

Beberapa peran yang dilakukan oleh BPPD Kepri tersebut memberikan dampak kepada masyarakat seperti terciptanya lapangan pekerjaan, memajukan teknologi di kawasan perbatasan. Sebagai lembaga yang menjalankan peran fungsi sebagai koordinator, BPPD Kepri juga merupakan pendorong perekonomian perbatasan, dengan data penurunan indikator makro tersebut merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang dipantau oleh BPPD, sehingga beberapa upaya yang dilakukan di mana intervensi pada akumulasi modal dan kerjasama luar negeri menjadi faktor pendukung signifikan dalam ekosistem pembangunan daerah.

Berdasarkan data BPS Kepri yang dilihat dari menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) pada tahun 2024 angka TPT di Kepri mencapai 6,39% dari pada tahun sebelumnya tahun 2023 TPT di Kepri mencapai 6,80%, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan TPT sebesar 0,41% di tahun 2024 (BPS Kepulauan Riau, 2024). Selain itu terjadi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 berdasarkan data BPS Kepri sebesar 5,37% lebih rendah dari pada tahun 2023 yang mencapai 5,69% hal ini bermakna bahwa masyarakat Kepri yang berada di garis kemiskinan berkurang di tahun 2024 (BPS Kepri, 2024).

Kemudian data ini didukung dari Laporan IPKP dan PKS N Kawasan Perbatasan Laut yang mendeskripsikan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 10 PKS N yang terdiri dari:

1. Pusat Layanan Kepabeaan, Imigrasi, dan Karantina (0,40)
2. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara (0,60)
3. Pusat Pelayanan Transportasi Laut (0,45)
4. Pusat Pelayanan Transportasi Udara (0,45)
5. Pusat Perdagangan dan Jasa (0,30)
6. Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Hasil pertanian/perkebunan (0,15)
7. Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Hasil Kelautan dan Perikanan (0,45)
8. Pusat Pengembangan Pariwisata (0,40)
9. Pusat Pemerintahan (0,60)
10. Pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (0,47).

Berdasarkan 10 fungsi PKS N di wilayah Ranai tersebut yang berdasarkan RPJM tahun 2020-2024 IPKP yang dimilikinya mencapai 0,47 sama dengan rata-rata capaian nilai IPKP pada 18 PKS N tahun 2022 maupun target IPKP PKS N pada RPJM tahun 2022 yang sebesar 0,47 dengan kategori C (cukup). Hal ini bertujuan untuk mendukung mencapai target dan sasaran yaitu dengan jumlah kecamatan lokpri perbatasan

negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelola kecamatan sebanyak 222 lokpri dan rata-rata NIKP pada 18 PKS N yang diharapkan pada Rencana Induk dan RPJMN mencapai 0,52 secara Nasional (Latuconsina et al., 2023).

Dampak yang diberikan tersebut tentunya menunjukkan bahwa peran BPPD Provinsi Kepri membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan beberapa peran yang telah dilakukan seperti akumulasi modal seperti alat tangkap ikan, kapal, budidaya hasil laut, dan kerjasama luar negeri Sosek Malindo yang membuka potensi besar bagi masyarakat kepri dari kegiatan ekspor impor, pariwisata, bahkan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat perbatasan.

IV. KESIMPULAN

BPPD Provinsi Kepri berperan dalam meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat. Peran yang dilakukan oleh BPPD Provinsi Kepri yaitu:

1) Peran Koordinatif dan Pengawasan BPPD Provinsi Kepri.

BPPD Provinsi Kepri dalam membantu mensejahterakan masyarakat perbatasan Kepulauan Riau adalah dengan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Peran BPPD Kepri sebagai koordinasi juga menerima usulan dari kabupaten/kota yang kemudian diusulkan kepusat untuk ditindaklanjuti, dan melakukan pengawas terhadap pembangunan berjalan sesuai dengan yang ditentukan.

2) Peran BPPD dalam Pengembangan Infrastruktur Perekonomian.

BPPD Provinsi Kepri berperan dalam mengembangkan infrastruktur perekonomian masyarakat perbatasan Kepri dengan membantu menyediakan kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana alat tangkap ikan, budidaya, bahkan penyediaan moda transportasi darat.

3) Peran BPPD dalam Kerjasama Luar Negeri Sosek Malindo.

BPPD kepri memiliki peran dalam kerjasama Sosek Malindo yaitu melalui rapat sosek malindo dengan melakukan kerjasama seperti bidang kesehatan, perdagangan, perhubungan, pariwisata, keselamatan dan pengurusan, bahkan bidang imigrasi dan bea cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, E. D., Perdana, P., Huda, S., & Rokimah, N. J. (2024). Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 -2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 417–426.
- Bppd Provinsi Kepri. (2024a). Peningkatan Pengelolaan Perbatasan Daerah Melalui Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. In Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Bppd Provinsi Kepri. (2024b). Rekapitulasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan New.
- Bps Kepri. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. 13(1–112).
- Bps Kepulauan Riau. (2024). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2024. Kepri.Bps.Go.Id.
- Bps Provinsi Kepri. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Iv 2024. Kepri.Bps.Go.Id.
- Bps Republik Indonesia. (2024). Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-To-C). Ekonomi Indonesia Triwulan Iv-2024 Tumbuh 5,02 Persen (Y-On-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan Iv-2024 Tumbuh 0,53 Persen (Q-To-Q). Bps.Go.Id.
- Delia, A. (2025). Tinjauan Yuridis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. *Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3, 10856–10867.
- Krestian, W., & W, H. W. (2025). Pengaruh Kerjasama Internasional Dan Kesiapan Alutsista Terhadap Stabilitas Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Perbatasan Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(5), 1407–1415.

- Latuconsina, H., Susilawati, Lismardiya, Manurung, R., Adiutama, A. A., Nugraha, M. A., Bancin, R. S. L., Butarbutar, G. J. M., Delpopi, M., Kristiana, W. A., Ichsan, A., Safitri, M. E., Dwijayanthi, R., Listiana, N., & Syahputra, R. (2023). Laporan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Ipkp & Pksn Kawasan Laut.
- Mahmut, C. (2022). Analisis Determinan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. In Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i3.23>
- Ogen. (2024). Kepri Galakkan Kerja Sama Perikanan Daerah Perbatasan Dengan Malaysia. Antara Kantor Berita Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau. 72, 13134.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Database Peraturan Indonesia, 141443.
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus : Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 9(2), 64–78.
- Setyawan, F., & Sumarto, R. H. (2025). Tantangan Dan Peluang Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5(2), 550–559.
- Sonia, P., & Susilawati. (2022). Literature Review: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(7), 896–904. <https://doi.org/10.46799/Jsa.V3i7.457>
- Tuakra, Y. (2025). Tata Kelola Perbatasan Yang Berkelanjutan : Sinergi Lintas Sektor Untuk Pembangunan Dan Keamanan Di Merauke Yulianus Tuakra. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1356–1368.
- Windasai, M. M. S. & H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(2), 307–316.